

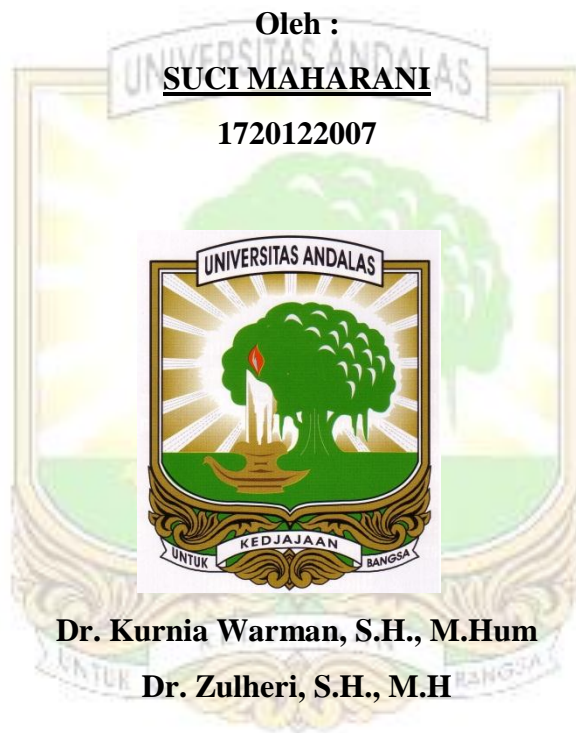
TESIS
PENYELESAIAN SENGKETA KONSOLIDASI TANAH DALAM
PEMBANGUNAN JALAN BY PASS KOTA PADANG MELALUI
PENGADILAN

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas*

Oleh :

SUCI MAHARANI

1720122007



Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Dr. Zulheri, S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PENYELESAIAN SENGKETA KONSOLIDASI TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN BY PASS KOTA PADANG MELALUI PENGADILAN

(Suci Maharani, 1720122007, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2019, 97 Halaman)

ABSTRAK

Pelaksanaan konsolidasi dalam pembangunan jalan By Pass Kota Padang pada dasarnya bersifat penataan kembali tanah dengan menata kembali persil-persil yang bentuknya tidak teratur menjadi teratur dan tertib sesuai rencana guna/tata ruang untuk kepentingan umum guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Terjadinya sengketa dalam pembangunan jalan By Pass kota padang terjadi karena ketidakadilan dalam pengembalian tanah peserta konsolidasi serta disebabkan oleh lambatnya proses pembangunan jalan tersebut dan juga tidak tuntasnya kinerja kepemimpinan terdahulu sehingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan karena tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan permasalahan dalam tesis ini yaitu:1)Bagaimana proses penyediaan tanah untuk pembangunan jalan By Pass Kota Padang melalui konsolidasi,2) Apa penyebab sengketa dalam proses pengembalian tanah peserta konsolidasi, dan 3)Apa akibat hukum dari Putusan Kasasi No.434K/Pdt/2017?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara serta penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis,1) Proses pengembalian tanah konsolidasi diberikan secara bertahap berupa tanah pengganti yang mana lokasinya telah disepakati oleh kedua belah pihak 2) Terjadinya sengketa dalam pembangunan jalan By Pass kota padang terjadi karena kurangnya jumlah tanah dalam pengembalian tanah peserta konsolidasi menyebabkan lambatnya proses pembangunan jalan tersebut dan juga tidak tuntasnya kinerja kepemimpinan terdahulu sehingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan. 3)Dengan keluarnya Putusan Kasasi No.434K/Pdt/2017 pihak Pemerintah Kota Padang harus segera memberikan sisa tanah pengganti milik penggugat.

Kata Kunci : Konsolidasi tanah, Sengketa Petanahan, Kepentingan umum.

THE SETTLEMENT OF LAND CONSOLIDATION IN BY PASS IN PADANG CITY THROUGH COURT.

(Suci Maharani, 1720122007, Masters Program of Notary, Faculty of Law
Andalas University, 2019, 97 Pages)

ABSTRACT

Consolidation in the construction of the By Pass road in the city of Padang is basically a land restructuring by rearranging the parcels which are irregular in form and orderly in accordance with the use or spatial plan for public interest in order to improve the quality of the environment and maintain natural resources by involving participation active community. The occurrence of disputes in the construction of the By Pass city road occurred due unfair in the return of the participating consolidated land and due to the slow process of road construction and also the incomplete performance of the previous leadership resulting in a prolonged impact due to non-fulfillment of community rights. Based on the description above, the problems raised in this thesis are: 1) How is the process of providing land for the construction of the By Pass City of Padang road through consolidation, 2) Why is there a dispute in returning the participating participant's land, and 3) What is legal consequences of the cassation decision?. The type of research used in this study is empirical juridical, namely legal research concerning the enforcement or implementation of normative legal provisions directly on any particular legal event that occurs in society. The method of data collection is done by interviewing and library research. Based on the results of the authors research, 1) Land consolidation return process is given in the form of replacement land where the location has been agreed by both parties 2) The occurrence of disputes in the construction of the By Pass city road occurred due to a lack of land in the return of participating consolidated land which caused the road construction process to slow and also the failure of previous leadership performance to have a prolonged impact. 3) With the release of the Cassation Decree No.434K / Pdt/2017 the City of Padang Government must immediately give the plaintiff's remaining replacement land.

Keywords: Land consolidation, Land settlement, Public interests.